

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Acho Nur and Amam Fakhrrur, 2019, *Hukum Acara Elektronik Di Pengadilan Agama*, Jakarta: Nizamia Learning Center. hlm.7

Bambang Soebiyantoro, dkk, 2020, *Praktik Dan Wacana Seputar Persidangan Elektronik (E-Litigation) Di Peradilan Tata Usaha Negara : Bagian III*, Yogyakarta: Budi Utama. hlm.9

Feny Rita Fiantika, dkk, 2022, *Metode Penelitian Kualitatif*, Padang Sumatera Barat: Global Eksekutif Teknologi. Hlm.21

Guntur Setiawan, 2004, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, Jakarta: Balai Pustaka. hlm.39

Hans Kelsen dalam Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana. hlm.158

H. Yuhelson, 2017, *Pengantar ilmu hukum*, Gorontalo: Ideas Publishing. hlm.3

Hj. Elza Syarief, 2020, *Praktik Peradilan Perdata Teknis dan Kiat Menangani Perkara di Pengadilan*, Jakarta Timur: Sinar Grafika. hlm.12

Muhammad Noor Halim Perdana Kusuma, Muhammad Adiguna Bimasakti, 2020, *Panduan Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara dan Persidangan Elektronik (E-Litigasi)*,

Jakarta: Kencana. hlm.110



Rudini Hasyim Rado, Marlyn Jane Alputila, Nurul Widhanita Y. Badilla, 2022, *Pengantar Ilmu Hukum (PIH)*, Jawa Tengah: Nasya Expanding Management. hlm.9

Sahar Maruli T. Situmeang, 2020, *Sistem Hukum Indonesia*, Bandung: Logos Publishing. hlm.82

Sudarsono & Rabbenstain Izroiel, 2022, *Petunjuk Praktis Beracara Di Peradilan Tata Usaha Negara (Konvensional dan Elektronik), Edisi Kedua*, Jakarta: Kencana. hlm.44

Soerjono Soekanto, 1988, *Efektivitas Hukum dan Pengaturan Sanksi*, Bandung: Ramadja Karya. hlm.80

Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm.21-22

Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Bandung: Alfabeta. hlm.80

Syarifda Hafni Sahir, 2021, *Metodologi Penelitian*, Jogjakarta: Kbm Indonesia. hlm.37

Yapiter Marpi, 2020, *Ilmu Hukum Suatu Pengantar*, Tasikmalaya: Zona Media Mandiri. hlm.36-38

Jurnal

Rokilah, Sulasno, 2021, Penerapan Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Ajudikasi Jurnal Ilmu Hukum Volume 5 Nomor 2. Hlm.179-190



Dewi Asimah, 2021, Persidangan Elektronik Sebagai Upaya Modernisasi Peradilan Di Era New Normal, Jurnal Hukum Peratun Volume 4 No. 1. hlm.1

Depri Liber Sonata, 2014, Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 8 No.1. hlm.1

Ariwijaya, Abdul Rchmat dan Samputra, Palupi Lindiasari, 2021, Evaluasi Kebijakan Peradilan Elektronik (E-Court) Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jurnal Hukum & Pembangunan Volume 51 Number 4. hlm.4

Nathannael Stanlis Imron dan Benhard Kurniawan Pasaribu,, 2022, Implementasi Sistem Peradilan Berbasis Online (E-Court) Ditengah Pandemi COVID 19 Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Oleh Advokat Di Pengadilan Negeri Samarinda, Jurnal Legalitas Volume 7 Nomor 1. hlm.8-9

Priseila Vania Maharani, Sri Maharani MVTM, 2024, Pelaksanaan Penyelesaian Perkara Perdata Melalui E-Court dan Permasalahannya di Pengadilan Negeri Surabaya, JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan) Volume 7 Nomor 4. hlm.1

Zhara Yusra,dkk, 2021, Pengelolaan LKP Pada Masa Pandemi Covid-19, Journal Lifelog Learning Vol.4 No.1. hlm.37

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3)



Undang-Undang Nomor 39 Tentang Kekuasaan Kehakiman
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang
Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik
Peraturan Mahkamah Agung No.7 Tahun 2022 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun
2019 Tentang Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan
Di Pengadilan Secara Elektronik
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :
363/KMA/SK/XII/2022

Tesis

Armada Yusri Nasution, 2022, *Efektivitas Sidang E-Litigasi Dalam
Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri
Pekanbaru*, Tesis, Universitas Islam Riau Pekanbaru.

Artikel

Dewi Lestuti Ambarwati, 2021, Perbedaan Perkara Perdata
dengan Perkara Pidana. Artikel DJKN. Diakses:
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwilsumseljambibabel/baca-artikel/14057/Perbedaan-Perkara-Perdata-dengan-PerkaraPidana.html#:~:text=Perkara%20dapat%20diartikan%20sebagai%20masalah,yang%20satu%20terhadap%20pihak%20lain.> (Diakses pada 9 Juni 2024)

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan
Republik Indonesia Kemudahan, 2021, Persidangan Secara
Daring Melalui E-Court Mahkamah Agung. Gd. Syafruddin



Prawiranegara II Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4, Jakarta Pusat.

Diakses:

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15817/Kemudahan-Persidangan-Secara-Daring-Melalui-e-court-Mahkamah-Agung.html> (Diakses pada 9 Juli 2024)

Mahkamah Agung RI, 2019, Menelusuri Informasi Melalui Hand Phone Bukan Pelanggaran Kode Etik . Diakses: <https://mahkamahagung.go.id/id/artikel3671/menelusuri-informasi-melalui-hand-phone-bukan-pelanggaran-kode-etik> (Diakses pada 1 Juli 2024)

Muhammad Najid Aufar, 7 Keuntungan Yang Didapat, Kalau Anda Beracara Secara Elektronik di Pengadilan. Diakses: <https://www.pa-ngamprah.go.id/images/artikel/7-Keuntungan-Yang-Didapat-Kalau-Anda-Beracara-Secara-Elektronik-di-Pengadilan.pdf> (Diakses pada 7 Juli 2024)

Website

Ahmad Farih Shofi Muhtar, 2023, Optimalisasi SIPP Menuju Pelayanan Peradilan Berbasis E-Serive di Pengadilan Agama Purwodadi. Diakses dari: <http://www.papurwodadi.go.id/index.php/26-halaman-depan/artikel/235-optimalisasi-fungsi-sipp-menuju-pelayanan-peradilan-berbasis-e-service-di-pengadilan-agama-purwodadi#:~:text=Aplikasi%20Sistem%20Informasi%20Pen>



elusuran%20Perkara,data%20perkara%20melalui%20aplika
si%20ini. (Diakses pada 9 Juni 2024)

DQLab, 2022, Pengertian Data Sekunder Menurut Beberapa Ahli.

Diakses: <https://dqlab.id/pengertian-data-sekunder-menurut-beberapa-ahli> (Diakses pada 4 Maret 2024)

Gustav Radburch dalam Dwika, 2011, Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum. Diakses: <http://hukum.kompasiana.com> (Diakses pada 28 Februari 2024)

Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2021. Mengenal Berbagai sisi PA Muara Teweh “Ruang Sidang”. Diakses: <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/mengenal-berbagai-sisi-pa-muara-teweh-ruang-sidang#:~:text=Persidangan%20adalah%20suatu%20pertemuan%20dua,disepakati%20oleh%20pihak%20yang%20hadir.> (Diakses pada 1 Juli 2024)

Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Serui. Provinsi Papua. Diakses: <https://pa-serui.go.id/prosedur-berperkara-secara-elektronik/> (Diakses pada 9 Juni 2024)

Mumtaza Azzahiroh, Hasan Alfi Zamahsari, Yan Mahameru, 2020. Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan Vol.2 No.2. Hlm.61. Diakses:

<https://ejournal.ipdn.ac.id./JTKP/article/download/2381/1131/>



#::~text=Adapun%20jenis%20perkara%20yang%20dapat,%
2C%20dan%20perkara%20perdata%20permohonan

(Diakses pada 9 Juni 2024)

Pengadilan Negeri Sumber Kelas IB, 2019. Buku Panduan E-Court. Sumber, Kabupaten Cirebon. Diakses: <https://pnsumber.go.id/gambar/files/EBook%20Modul%20Panduan%20ECOURT%20PN%20SUMBER.pdf> (Diakses pada 9 Februari 2024)

Pengadilan Tinggi Agama Jambi, Pola Prosedur Penyelenggaraan Administrasi Perkara. Jambi. Diakses: <https://www.pta-jambi.go.id/attach> (Diakses pada 9 Juni 2024)

Syafnidawaty, 2020, Pengertian Data Primer, Universitas Raharja. Diakses dari: <https://raharja.ac.id./2020/11/08/da> (Diakses 4 Maret 2024)



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Bukti Penelitian



Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara





Lampiran 3 Daftar pertanyaan wawancara

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA PENELITIAN SKRIPSI


NAMA : LUTHFIYAH ADIRIFAH
NIM : 8012202391
FAKULTAS : ILMU HUKUM/FAKULTAS HUKUM
PERGURUAN TINGGI : UNIVERSITAS HASANUDDIN
JUDUL SKRIPSI : IMPLEMENTASI PERMA NO.7 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMA NO.1 TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DIPENGADILAN SECARA ELEKTRONIK (STUDI KASUS PN PALOPO)

PERTANYAAN:

1. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung No.7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dalam Penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Negeri Palopo?
 1. Bagaimana proses implementasi Peraturan Mahkamah Agung No.7 Tahun 2022 di Pengadilan Negeri Palopo?
 2. Apa saja langkah-langkah konkret yang telah diambil oleh Pengadilan Negeri Palopo untuk memastikan pelaksanaan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik sesuai dengan peraturan tersebut?
 3. Apa manfaat yang dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan di Pengadilan Negeri Palopo setelah diterapkannya sistem elektronik sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No.7 Tahun 2022?
2. Bagaimana faktor yang menjadi penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung No.7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik dalam penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Negeri Palopo?
 1. Apa saja tantangan teknis yang dihadapi dalam mengimplementasikan sistem administrasi perkara dan persidangan elektronik di Pengadilan Negeri Palopo?
 2. Apakah terdapat hambatan hukum atau regulasi yang menghambat pelaksanaan sistem administrasi perkara dan persidangan elektronik di Pengadilan Negeri Palopo?

c. Bagaimana tingkat dukungan dan partisipasi aktif dari para pemangku kepentingan, seperti hakim, pegawai, dan pihak hukum lainnya, dalam menerapkan Peraturan Mahkamah Agung tersebut?

Yang bertanda tangan di bawah ini,

 Dr. Sukho Yanto S.H., LL.M.	 KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, TEKNOLOGI, INFORMATIKA, DAN SISTEM PENGADILAN NEGERI II PALOPO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

